

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Berita politik, produk dari jurnalisme politik, merupakan salah satu ranah paling penting dari jurnalistik itu sendiri. Disebut sebagai bagian paling ‘sakral’ (Neveu, 2002 dalam Strömbäck & Shehata, 2018), jurnalisme politik esensial bagi keberlangsungan demokrasi. Telah lama pers bertanggung jawab sebagai pemantau independen terhadap kekuasaan — berperan sebagai anjing penjaga (*watchdog*) — demi melayani kebutuhan publik akan transparansi pemerintah (Kovach & Rosenstiel, 2003). Idealnya, selain sebagai *watchdog*, jurnalisme politik berfungsi sebagai penyedia informasi dan forum untuk diskusi politik. Dengan demikian, masyarakat dapat dengan mudah mengerti masalah politik dan membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan (Strömbäck & Shehata, 2018).

Pentingnya fungsi ini bagi masyarakat diterjemahkan dalam mudahnya akses berita di era teknologi digital, termasuk berita politik. Hadirnya internet dan meningkatnya aksesibilitas informasi melalui perangkat genggam dan media sosial telah mengubah struktur pasar media, praktik jurnalistik, dan pola konsumsi berita (Strömbäck & Shehata, 2018), tak terkecuali di Indonesia. Survei Maverick Indonesia pada 22 September – 8 Oktober 2020 menunjukkan bahwa portal berita daring (*online*) menjadi sumber utama generasi muda dalam mendapatkan berita di angka 85% (Bayu, 2020). Sebanyak 84% responden mendapatkan berita dari media sosial, dan 43 % dari aplikasi percakapan. Hasil ini selaras dengan laporan Reuters Institute Digital News Report 2023 yang menyebutkan bahwa 84% responden di Indonesia mendapatkan berita melalui media daring, termasuk media sosial (Newman et al., 2023). Namun, seiring dengan kemudahan mengakses berita, semakin mudah pula untuk sama sekali menghindar dari berita (Newman et al., 2017),

atau beristirahat sejenak dari berita yang dianggap melelahkan (Palmer & Toff, 2020).

News avoidance atau penghindaran berita telah menjadi salah satu masalah bagi industri media dan demokrasi secara luas (Skovsgaard & Andersen, 2019). Laporan Digital News Report 2021 dari Reuters Institute juga menyebutkan bahwa meski angka konsumsi berita masih cukup tinggi, cukup banyak audiens yang berpaling dari media berita dan bahkan menghindari berita secara keseluruhan (Newman et al., 2021). Terlebih lagi, Reuters Institute melaporkan peningkatan *news avoidance* aktif, dari 29% pada 2017 menjadi 32% pada 2019 (Newman et al., 2017, 2019). Lebih lanjut, laporan Digital News Report 2023 juga menyebutkan tingginya tingkat penghindaran berita secara selektif (responden yang secara aktif menghindar seringkali atau kadang-kadang), dengan angka 36% (Newman et al., 2023). Selama beberapa tahun, angka *news avoiders* ini fluktuatif, dengan hanya 29% pada 2017 dan mencapai rekor yaitu 38% di 2022 (Newman et al., 2017, 2022). Motif dan alasan penghindaran berita ini cukup beragam— mulai dari efek negatif berita terhadap mood atau suasana hati (Newman et al., 2017, 2019), perasaan ‘tak berdaya’ untuk mengubah peristiwa (Newman et al., 2019), atau semata-mata tidak memiliki waktu (Palmer & Toff, 2020). Selain itu, sirkulasi berita yang serbacepat dan menyebabkan banjir informasi disebut dapat mengakibatkan kondisi *news fatigue* atau kelelahan karena informasi berlebih (Azari & Setianto, 2021). Menurut Azari & Setianto, kondisi inilah yang akhirnya juga dapat mengarah pada *news avoidance*.

Studi Edgerly (2021) juga menunjukkan kemungkinan hubungan ketertarikan suatu kelompok terhadap politik dengan tingkat *news avoidance* mereka. Beberapa penelitian terdahulu membuktikan bahwa *news avoider* atau penghindar berita memiliki ketertarikan politik yang lebih rendah dibanding konsumen berita reguler lainnya— dengan kata lain, seseorang yang tidak menyukai politik dapat dikatakan tidak merasa berita berarti penting baginya (Edgerly, 2021). Pengaitan istilah ‘berita’ dengan ‘politik’ juga sering terjadi,

dengan sikap mereka terhadap politik yang cenderung enggan dan apatis, semakin membuat mereka menjauhi berita (Palmer & Toff, 2020). Mereka juga menyebutkan ketidakpercayaan publik terhadap media, terutama terkait informasi politik.

News avoidance disebut sebagai konsep yang sarat nilai dengan konotasi negatif, khususnya terkait dengan berita kepentingan publik (Villi et al., 2021). Hal ini terlihat dari banyaknya upaya dari peneliti dan praktisi media untuk mengatasi penghindaran berita tersebut. (Newman et al., 2023; Villi et al., 2021). Namun, riset lain menunjukkan tingginya penghindaran akan suatu topik berita justru meningkatkan tingkat partisipasi mereka dalam masyarakat sosial (Ohme et al., 2022). Dalam studi longitudinal tersebut, Ohme et al. (2022) menemukan bahwa seiring waktu, *news avoidance* justru berkorelasi positif dengan partisipasi pada aktivitas sosial dalam krisis. Hal ini memungkinkan adanya interaksi antara *news avoidance* dan efektivitas politik, karena tingginya efektivitas berhubungan dengan aktivitas sosial dan partisipasi politik (Ohme et al., 2022).

Berbagai *platform* media digital telah mengubah struktur politik, termasuk di Indonesia. Masyarakat menggunakan media sosial untuk berpartisipasi politik dan memberi opini politik. Istilah ‘partisipasi politik’ berarti setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam lingkup publik (Saud & Margono, 2021). Warga negara disebut hanya akan mencapai pemberdayaan sepenuhnya jika memiliki peran dalam aktivitas demokratis (Masiha et al., 2018 dalam Saud & Margono, 2021). Hal ini menjadi pertanyaan jika masyarakat menghindar dari berita karena alasan politik, dan kemudian menolak untuk berpartisipasi dalam politik, khususnya Pemilu. Apabila warga negara menghindar dari politik, sistem sosial disebut akan kehilangan fungsi legitimasinya (Yoldaş, 2015).

Penelitian ini berusaha untuk mengaitkan partisipasi politik menggunakan *Theory of Planned Behavior* (TPB) oleh Ajzen (1991). Teori ini adalah pengembangan dan penyempurnaan dari *theory of reasoned action*. Teori

tersebut menyebutkan bahwa hanya sikap tertentu terhadap suatu perilaku yang dapat memprediksi dilakukan atau tidaknya perilaku tersebut (Ajzen, 1991). Teori ini digunakan untuk memprediksi perilaku yang tidak sepenuhnya di bawah kendali individu, seperti *news avoidance* yang juga termasuk *unintentional news avoidance*, tidak seperti *theory of reasoned action* yang diaplikasikan pada perilaku yang di bawah kendali individu itu sendiri. *Theory of Planned Behavior* terbukti dapat menjelaskan partisipasi politik di berbagai negara (Homyamyen & Kulachai, 2023), dan juga dapat memprediksi motivasi partisipasi politik dari pemilih muda (Sihombing & Pramono, 2021).

Dalam penelitian ini, penulis meneliti apakah sikap menghindar dari berita politik (*political news avoidance*) tersebut dapat berpengaruh terhadap partisipasi politik masyarakat Indonesia, khususnya pemilih muda. Umumnya dalam riset, istilah pemilih muda dikategorikan sebagai masyarakat yang memiliki hak pilih dan termasuk dalam generasi Millennial dan Generasi Z, seperti halnya pada Fernandes et al. (2022). Pada 2018, Pew Research Center menyebutkan bahwa kelahiran 1981 sampai 1996 dianggap sebagai Millennial, dan kelahiran 1997 seterusnya termasuk dalam kategori Generasi Z (Dimock, 2019). Salah satu hal unik yang dapat mendefinisikan Generasi Z atau Gen Z ialah generasi ini terlahir sebagai *digital native*—tidak pernah hidup dalam era tanpa internet—dan telah terbiasa berinteraksi dan berkomunikasi di dunia yang selalu terhubung (Turner, 2015), termasuk akses terhadap media sosial dan berita daring. Hasil survei juga menunjukkan bahwa mayoritas anak muda di Indonesia kerap menjadikan media sosial sebagai sumber informasi utama, dengan peningkatan menjadi 59% pada 2022 (Fernandes et al., 2022). Dalam survei yang sama, hanya 6,3% anak muda Indonesia yang mendapatkan informasi melalui berita daring, sementara surat kabar dan radio memiliki audiens yang jauh lebih kecil. Media sosial, meski sarat akan informasi, tetap lebih cenderung digunakan untuk melihat konten hiburan dibandingkan topik berita lainnya seperti politik, setidaknya pada TikTok dan Instagram (Newman et al., 2023).

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kecenderungan tidak menyukai berita politik yang tergambar pada Gen Z Indonesia dari hasil temuan Indopol Survey. Dilansir *Republika* (19/12/2021), sebanyak 42,32% responden Generasi Z dan Millennial Indonesia mengaku jarang menerima informasi politik, 24,8% menjawab tidak pernah, dan 10,83% menjawab tidak tahu. Mayoritas yang menerima informasi politik tersebut pun hanya membaca atau menonton jika tertarik, atau bahkan membaca judulnya saja. Hasil ini selaras dengan penelitian Putri Yolanda dan Halim pada 2020 mengenai partisipasi politik daring Gen Z. Partisipasi politik instrumental dan informatif lebih banyak dilakukan dibandingkan strategis, serta sebagian besar Gen Z hanya melihat atau membaca saja tanpa berpartisipasi lebih lanjut atau melibatkan orang lain (Putri Yolanda & Halim, 2020). Terlebih lagi, dilansir *Republika* (03/07/2023), 56% pemilih pada Pilpres 2024 didominasi oleh Gen Z dan Milenial yang merupakan pemilih muda. Hal ini menjadi landasan penelitian ketika separuh lebih pemilih adalah anak muda yang dalam beberapa penelitian, dianggap acuh terhadap politik dan berita secara umum (Edgerly, 2021; Setianto & Praceka, 2023; Toff & Kalogeropoulos, 2020)

Penulis mempersempit populasi penelitian dengan membatasi responden yang termasuk dalam Gen Z. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020, Gen Z mencakup lebih dari 71 juta penduduk (Badan Pusat Statistik, 2020), yang merupakan 26% dari seluruh penduduk Indonesia. Sementara itu, berdasarkan keterangan KPU pada rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat nasional tahun 2024, akan terdapat lebih dari 46 juta penduduk Gen Z yang terdaftar sebagai pemilih (Ramadhan, 2023). Menurut data DPT (Komisi Pemilihan Umum, 2023), angka ini mencakup 23% dari seluruh pemilih. Selain itu, hasil survei dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) pada 2022 menunjukkan peningkatan partisipasi pemilih muda di Indonesia dari Pemilu 2014 ke Pemilu 2019, yakni dari 85,9% ke 91,3% responden (Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, 2022). Berangkat dari data-data tersebut, pemilih muda yang termasuk Gen Z akan menjadi fokus dalam penelitian ini.

Agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada pemilih muda yang termasuk Gen Z, penelitian bersifat eksplanatif ini akan menggunakan metode kuantitatif berupa survei, yang akan dijelaskan lebih lanjut pada bab berikutnya. Nantinya, hasil penelitian akan dianalisis menggunakan regresi linear untuk menentukan pengaruh pada kedua variabel penelitian setelah sebelumnya dibuktikan hubungannya melalui uji linearitas. Hubungan antara *political news avoidance* dengan partisipasi politik ini menjadi penting untuk diteliti, salah satunya karena masih sedikit penelitian yang berfokus pada *news avoidance* dengan konteks lingkungan dan kultural Indonesia yang unik. Di Malaysia dalam penelitian Willnat et al. (2013), akses terhadap berita politik yang tersaji dalam blog politik, forum daring, dan sumber-sumber internet lainnya memiliki peran besar dalam kampanye pemilu 2008 mereka, khususnya bagi warga yang secara aktif mencari informasi independen dan berimbang. Media daring membantu pemilih yang tertarik untuk menemukan informasi politik yang kritis dan relevan, yang pada akhirnya mempengaruhi partisipasi politik mereka (Willnat et al., 2013). Oleh karena itu, penulis mencoba meneliti apa pengaruhnya bagi partisipasi politik pemilih muda jika informasi politik tersebut, yang sangat berperan dalam keputusan masyarakat khususnya di Pilpres 2024, justru dihindari secara aktif.

1.2 Rumusan Masalah

Adakah pengaruh tingkat *political news avoidance* terkait Pilpres 2024 terhadap tingkat partisipasi politik pemilih Gen Z di Indonesia?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, berikut pertanyaan penelitian yang akan dijawab oleh karya ilmiah ini:

1. Seberapa besar tingkat *political news avoidance* terkait Pilpres 2024 pada pemilih muda Gen Z di Indonesia?

2. Seberapa besar tingkat partisipasi politik pemilih muda Gen Z di Indonesia?
3. Seberapa besar pengaruh tingkat *political news avoidance* terkait Pilpres 2024 terhadap partisipasi politik pemilih muda Gen Z di Indonesia?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian, berikut tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui tingkat *political news avoidance* terkait Pilpres 2024 pada pemilih muda Gen Z di Indonesia
2. Untuk mengetahui tingkat partisipasi politik pemilih muda Gen Z di Indonesia
3. Untuk mengetahui besar pengaruh tingkat *political news avoidance* terkait Pilpres 2024 terhadap partisipasi politik pemilih muda Gen Z di Indonesia

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Akademis

Pertama-tama, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian terdahulu terkait *news avoidance* pada masyarakat Indonesia. Ditambah dengan konsep *political news avoidance* yang belum pernah dikaitkan dengan partisipasi politik pemilih muda Indonesia sehingga dapat mengisi kekosongan penelitian. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya yang ingin mengetahui faktor apa saja yang memengaruhi *news avoidance* dengan topik lain pada pemilih muda di Indonesia. Penelitian selanjutnya berupa intensitas *news avoidance* pada pemilih muda (Gen Z dan Millennial) juga dapat dilakukan.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi perusahaan media untuk menentukan *political stance* yang tergambar dalam konten media agar generasi muda yang melakukan *political news avoidance* dapat kembali mendapat informasi politik penting. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi pemerintah dan partai politik untuk memahami partisipasi politik pemilih muda Gen Z Indonesia yang berhubungan dengan intensitas berita politik yang dikonsumsi.

1.5.3 Kegunaan Sosial

Hasil pada penelitian ini dapat memberi gambaran mengenai sikap generasi muda terhadap berita, terutama berita politik, sekaligus penghindarannya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan dan diskusi masyarakat mengenai *news avoidance* dan partisipasi politik pada pemilih muda di Indonesia.

1.6 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini hanya berusaha mengukur *news avoidance* terhadap berita politik Pilpres 2024 saja, dan bukan *news avoidance* terhadap berita secara keseluruhan. Selain itu, *political news avoidance* dan partisipasi politik diukur terkonsentrasi di beberapa provinsi saja dan belum merepresentasikan masyarakat Indonesia secara menyeluruh.

U N I V E R S I T A S
M U L T I M E D I A
N U S A N T A R A